

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

SKPD : Dinas Perkebunan
TAHUN ANGGARAN : 2026

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / (Indikator/Tujuan)	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Baseline)	Indikator Kinerja
PROGRAM : PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN KEGIATAN : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan SUB KEGIATAN : Pendampingan dan pengawasan korporasi petani TUJUAN : Meningkatkan nilai tambah produk agroindustri perkebunan sehingga mampu meningkatkan harga produk /pendapatan, kesejahteraan petani	Pengembangan korporasi petani merupakan salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat kelembagaan pekebun serta meningkatkan skala ekonomi usaha perkebunan melalui pengelolaan usaha yang lebih terintegrasi, efisien, dan berdaya saing. Korporasi petani diharapkan mampu meningkatkan posisi tawar pekebun dalam rantai nilai usaha perkebunan, memperluas akses terhadap teknologi, pembiayaan, dan pasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkebunan. Di Kalimantan Timur telah terbentuk korporasi petani di Kabupaten Paser yaitu Korporasi Induk Paser Jaya Bersama sesuai Surat keputusan Bupati Paser Nomor 100.3.32/KEP-91/2025 tentang Pentapan kawasan Perkebunan berbasis Korporasi Petani Korporasi tersebut beranggotakan 18 Koperasi Unit Desa perempuan. Dengan pengurus kelompok 100 % laki laki dan 0 % perempuan. Dalam pelaksanaannya, pengembangan korporasi petani memerlukan kegiatan pendampingan dan pengawasan agar kelembagaan petani dapat berjalan secara efektif, memiliki tata kelola usaha yang baik, serta mampu mengelola usaha secara profesional. Peserta pembinaan dan pendampingan kelembagaan yang telah dilakukan 77% laki laki dan 23 % perempuan Namun demikian, dalam pengembangan kelembagaan petani masih terdapat kesenjangan gender, dimana keterlibatan perempuan dalam kepengurusan kelompok tani, koperasi, maupun kelembagaan usaha perkebunan masih relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki. Padahal perempuan juga berperan dalam kegiatan usaha perkebunan, baik dalam kegiatan budidaya, pengolahan hasil, maupun pengelolaan usaha keluarga. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan dan pengawasan korporasi petani perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang responsif gender agar laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses informasi, berpartisipasi dalam pengelolaan kelembagaan, serta memperoleh manfaat dari pengembangan usaha perkebunan melalui korporasi petani.	Akses : Perempuan yang terlibat dalam usaha perkebunan masih memiliki keterbatasan akses terhadap informasi, pembinaan, dan pendampingan terkait pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi petani, termasuk akses terhadap pelatihan manajemen usaha, teknologi produksi, serta akses pembiayaan dan pemasaran. Partisipasi : Partisipasi perempuan dalam kegiatan pendampingan dan pengawasan korporasi petani masih relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki, terutama dalam kegiatan pertemuan kelompok, pelatihan manajemen usaha, maupun forum pengambilan keputusan dalam kelembagaan petani. Kontrol : Pengambilan keputusan dalam pengelolaan kelembagaan korporasi petani, seperti penentuan kebijakan usaha, pengelolaan keuangan, dan perencanaan kegiatan usaha, masih didominasi oleh laki-laki karena sebagian besar posisi kepengurusan kelompok tani atau koperasi dipegang oleh laki-laki. Manfaat : Manfaat dari pengembangan korporasi petani seperti peningkatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, peningkatan nilai tambah produk, dan perluasan jaringan pemasaran belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh perempuan yang juga terlibat dalam kegiatan usaha perkebunan.	1. Peran domestik perempuan yang membatasi waktu untuk terlibat aktif dalam kegiatan kelembagaan petani. 2. Keterbatasan pengalaman perempuan dalam pengelolaan organisasi atau usaha kolektif. 3. Rendahnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan kelompok tani atau koperasi.	1. Proses pembentukan dan penguatan kelembagaan petani yang masih didominasi oleh laki-laki. 2. Kurangnya dorongan atau kebijakan internal kelompok yang mendorong keterlibatan perempuan dalam kepengurusan. 3. Kegiatan pendampingan yang belum sepenuhnya memperimbangan keterlibatan perempuan.	Meningkatkan diversifikasi produk dan nilai tambah produk agroindustri perkebunan sehingga mampu meningkatkan harga produk /pendapatan, kesejahteraan petani	1. Pembinaan Indikasi Geografis. 2. Pelatihan manajemen dan keuangan usaha kelembagaan Masukan : Rp. 49,970,352 Keluaran : 1. Terlaksananya kegiatan pendampingan dan pengawasan korporasi petani yang melibatkan laki-laki dan perempuan. 2. Meningkatnya pemahaman anggota korporasi petani mengenai pengelolaan kelembagaan dan usaha perkebunan. 3. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam kegiatan penguatan kelembagaan petani. Hasil : 1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan korporasi petani dalam mengelola usaha perkebunan secara profesional 2. Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pengelolaan kelembagaan petani dan pengambilan keputusan. 3. Meningkatnya akses dan manfaat ekonomi bagi anggota korporasi petani, baik laki-laki maupun perempuan.	Pengembangan korporasi petani merupakan salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat kelembagaan pekebun serta meningkatkan skala ekonomi usaha perkebunan melalui pengelolaan usaha yang lebih terintegrasi, efisien, dan berdaya saing. Korporasi petani diharapkan mampu meningkatkan posisi tawar pekebun dalam rantai nilai usaha perkebunan, memperluas akses terhadap teknologi, pembiayaan, dan pasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkebunan. Di Kalimantan Timur telah terbentuk korporasi petani di Kabupaten Paser yaitu Korporasi Induk Paser Jaya Bersama sesuai Surat keputusan Bupati Paser Nomor 100.3.32/KEP-91/2025 tentang Pentapan kawasan Perkebunan berbasis Korporasi Petani Korporasi tersebut beranggotakan 18 Koperasi Unit Desa perempuan. Dengan pengurus kelompok 100 % laki laki dan 0 % perempuan. Dalam pelaksanaannya, pengembangan korporasi petani memerlukan kegiatan pendampingan dan pengawasan agar kelembagaan petani dapat berjalan secara efektif, memiliki tata kelola usaha yang baik, serta mampu mengelola usaha secara profesional. Peserta pembinaan dan pendampingan kelembagaan yang telah dilakukan 77% laki laki dan 23 % perempuan Namun demikian, dalam pengembangan kelembagaan petani masih terdapat kesenjangan gender, dimana keterlibatan perempuan dalam kepengurusan kelompok tani, koperasi, maupun kelembagaan usaha perkebunan masih relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki. Padahal perempuan juga berperan dalam kegiatan usaha perkebunan, baik dalam kegiatan budidaya, pengolahan hasil, maupun pengelolaan usaha keluarga. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan dan pengawasan korporasi petani perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang responsif gender agar laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses informasi, berpartisipasi dalam pengelolaan kelembagaan, serta memperoleh manfaat dari pengembangan usaha perkebunan melalui korporasi petani.	Output : Jumlah korporasi petani yang didampingi Outcome : 1. Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat 2. Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Kapasitasnya Meningkat Indikator Kinerja : Jumlah korporasi petani yang didampingi

Samarinda, 30 Maret 2026

Pt. Kepala Dinas

Ahmad Muzakir, S.T., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197510012001121003